

BAB I

PENDAHULUAN UMUM

1.1 Latar Belakang Umum dan Konteks Masalah

Hasil perikanan berbasis ekspor merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, baik pada skala nasional maupun global. Kontribusi sektor ini tidak hanya tercermin dari nilai ekspor yang dihasilkan, tetapi juga dari perannya dalam membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah (Effendi et al., 2019; Yanfika et al., 2020). Dalam konteks tersebut, Kabupaten Bone sebagai salah satu wilayah pesisir di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi sumberdaya perikanan yang melimpah dan beragam, sehingga sektor perikanan menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat setempat. Perikanan berbasis ekspor secara signifikan mampu menyumbang ekonomi suatu negara, baik dari sisi penyerapan tenaga kerjanya maupun dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonominya (Yusuf, R., & Tajerin 2020; Faizal Amir, Dedi Budiman Hakim & Tanti Novianti 2018).

Pemerintah Indonesia memberi peluang kepada pihak swasta untuk berinvestasi dalam upaya untuk mengatasi keterbatasan anggaran di daerah khususnya di sektor perikanan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur kemitraan dalam pengelolaan dan ekspor hasil perikanan di Indonesia, pemerintah berupaya meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global serta memastikan keberlanjutan sumberdaya laut (Cindy Septiany Huda, 2023, pp. 2-3). Pemerintah memahami bahwa percepatan pembangunan seiring dengan pertumbuhan populasi rakyat sehingga kesenjangan setiap daerah menjadi masalah dalam mendorong perekonomian sektor perikanan di Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menjelaskan bahwa sumber pelaksanaan pendanaan ekspor hasil perikanan terdiri dari pajak penghasilan dari perusahaan perikanan, pajak daerah yang dikenakan atas aktivitas perikanan seperti retribusi usaha, pendapatan hasil ekspor, pengelolaan.

Namun demikian, besarnya potensi sumberdaya perikanan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan tata kelola kemitraan dan sistem penanganan hasil perikanan yang optimal, khususnya yang berorientasi ekspor. Berdasarkan observasi awal peneliti, terdapat kelemahan mendasar dalam pola kemitraan antara nelayan dan perusahaan mitra, serta dalam penanganan pascapanen hasil perikanan berbasis ekspor di Kabupaten Bone. Permasalahan utama muncul pada keterbatasan kapasitas penanganan pascapanen dan infrastruktur rantai dingin (*cold chain*), yang berimplikasi langsung pada rendahnya kualitas dan daya saing hasil perikanan.

Keterbatasan fasilitas dan sumberdaya tersebut menyebabkan sebagian hasil perikanan yang dihasilkan oleh nelayan mitra tidak dapat diserap secara optimal oleh perusahaan eksportir. Akibatnya, hasil tangkapan yang seharusnya memiliki potensi nilai tambah tinggi melalui pasar ekspor justru terdistribusi ke pasar lokal dengan harga yang relatif rendah dan tanpa sistem pengelolaan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kapasitas produksi nelayan dan kapasitas serap industri pengolahan serta ekspor.

Permasalahan tersebut semakin terkonfirmasi melalui data empiris hasil perikanan di Kabupaten Bone. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Dinas Kelautan dan Perikanan (2025), terlihat adanya kesenjangan yang signifikan antara total produksi hasil perikanan dan jumlah hasil perikanan yang mampu diserap dalam skema kemitraan berbasis ekspor. Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa dari empat komoditas utama Tuna, Tongkol, Cakalang, dan Udang volume produksi nelayan secara konsisten jauh melampaui kapasitas serapan perusahaan mitra.

Tabel 1.1 Hasil Perikanan Ekspor Kabupaten Bone Berdasarkan Jenisnya Lima Tahun Terakhir

Jenis	2019		2020		2021		2022		2023	
	Produksi (Ton)	Kemitraan Ekspor (Ton)	Produksi (Ton)	Kemitraan Ekspor (Ton)	Produksi (Ton)	Kemitraan Ekspor (Ton)	Produksi (Ton)	Kemitraan Ekspor (Ton)	Produksi (Ton)	Kemitraan Ekspor (Ton)
Tuna	3.361	84,98	3.065	49,6	2.856	26,8	3.448	25,17	1.984	68,5
Tongkol	5.490	124,9	6.064	173,6	7.076	160,83	5.314	117,4	824	17,12
Cakalang	3.743	89,9	3.544	54,56	6.670	107,22	5.991	125, 88	3.366	137
Udang	5.103	99,98	5.360	148,8	8.562	241,24	9.998	167,84	448	10,27
Total Produk	17.697	499,9	18.033	496,0	25.164	536,1	24.751	419,6	6.622	342,5

Sumber: BPS/Dinas Kelautan dan Perikanan (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, bahwa salah satu permasalahan utama dalam pengelolaan hasil perikanan berbasis ekspor di Kabupaten Bone terletak pada rendahnya daya serap hasil tangkapan oleh perusahaan mitra dalam skema kemitraan. Data menunjukkan bahwa dari empat komoditas utama yakni, Tuna, Tongkol, Cakalang, dan Udang, jumlah hasil panen nelayan jauh melebihi kapasitas serapan industri pengolahan dan ekspor.

Pada tahun 2019, dari total produksi sebesar 17.697 ton, hanya 499,9 ton atau sekitar 2,82% yang berhasil diserap oleh perusahaan mitra dalam skema ekspor. Kondisi serupa berlanjut pada tahun 2020, di mana dari 18.033 ton hasil produksi, hanya 496 ton atau sekitar 2,75% yang masuk ke dalam rantai ekspor. Bahkan ketika produksi meningkat secara signifikan pada tahun 2021 menjadi 25.164 ton, kemampuan serap industri hanya mencapai 536,1 ton atau sekitar 2,13%. Tren penurunan daya serap ini terus berlanjut pada tahun 2022, dengan tingkat serapan sebesar 1,69% dari total produksi. Meskipun pada tahun 2023 terjadi peningkatan persentase serapan menjadi 5,17%, kondisi ini lebih disebabkan oleh penurunan volume produksi secara drastis dibandingkan peningkatan kapasitas kemitraan itu sendiri. Secara kumulatif, total hasil perikanan yang berhasil terserap dalam skema kemitraan berbasis ekspor di Kabupaten Bone hanya mencapai 2,91% dari keseluruhan produksi selama lima tahun terakhir. Angka ini menunjukkan tingkat efektivitas kemitraan yang masih sangat rendah dan belum mampu mengakomodasi potensi produksi nelayan secara optimal. Ketimpangan ini menjadi indikator bahwa struktur kemitraan yang ada belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kemitraan yang seharusnya mengedepankan hubungan, sumberdaya, keseimbangan peran, dan keberlanjutan.

Tabel 1.2 Hasil Serapan Program Kemitraan Kabupaten Bone

Tahun	Total Produksi (ton)	Kemitraan Ekspor (ton)	%Kemitraan Ekspor	Pasar Lokal (ton)	% Pasar Lokal
2019	17.697	499,9	2,82%	17.197,1	97,18%
2020	18.033	496,0	2,75%	17.537,0	97,25%
2021	25.164	536,1	2,13%	24.627,9	97,87%
2022	24.751	419,6	2,13%	24.331,4	98,31%
2023	6.622	342,5	5,17%	6.279,5	94,83%
Total	92.267	2.294,1	15,00%	89.972,9	97,09%

Sumber: BPS/Dinas Kelautan dan Perikanan (2025)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, secara kumulatif, selama lima tahun terakhir total hasil perikanan yang terserap dalam skema kemitraan berbasis ekspor di Kabupaten Bone hanya mencapai sekitar 2,91% dari keseluruhan produksi. Sebaliknya, sekitar 97,09% hasil perikanan terdistribusi ke pasar lokal. Ketimpangan ini mencerminkan rendahnya efektivitas kemitraan yang berjalan serta menunjukkan bahwa struktur kemitraan yang ada belum mampu mengakomodasi potensi produksi nelayan secara optimal.

Rendahnya daya serap hasil perikanan dalam kemitraan berbasis ekspor berdampak pada terbatasnya akses nelayan terhadap pasar ekspor, kemudian menghambat proses hilirisasi dan penciptaan nilai tambah. Lemahnya struktur hubungan antar aktor dalam kemitraan, ketimpangan relasi antara nelayan dan pelaku usaha, dominasi tengkulak, serta rendahnya posisi tawar nelayan menjadi faktor-faktor yang memperkuat ketidakefisienan sistem kemitraan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemitraan yang berjalan belum didasarkan pada prinsip keseimbangan peran, keadilan, dan keberlanjutan (Vargas et al 2023). Namun masih sedikit kemitraan yang secara spesifik menganalisis hubungan pemerintah, swasta dengan nelayan berbasis ekspor. Padahal, Efektivitas kebijakan daerah, Fragmentasi koordinasi antar aktor, dan Kapasitas layanan pemerintah untuk mendukung hasil tangkapan nelayan masuk ke rantai ekspor merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menjaga mutu produk perikanan agar dapat bersaing di pasar internasional, (Sekar Damayanti et al 2025).

Di sinilah letak research gap utama yang ingin diisi oleh penelitian ini. Berdasarkan tinjauan literatur, kajian mengenai sektor perikanan berbasis ekspor selama ini masih didominasi oleh pendekatan teknis dan ekonomi yang menitikberatkan pada aspek produksi, kualitas hasil tangkapan, efisiensi rantai pasok, serta standar mutu produk untuk pasar internasional. Sebagian besar penelitian memandang keberhasilan ekspor perikanan terutama dari sisi kapasitas produksi, teknologi pascapanen, dan daya saing komoditas, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana pola kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan nelayan dibangun, dikelola, serta diimplementasikan dalam praktik (Agustina Setyaningrum dan Ernastin Maria 2022). Akibatnya, peran aktor kelembagaan dan dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan hasil perikanan pascapanen hingga proses ekspor masih relatif terabaikan. Padahal, kemitraan yang efektif memiliki peran strategis dalam menjamin keberlanjutan usaha, peningkatan nilai tambah, serta akses nelayan terhadap pasar ekspor. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan analisis pada kemitraan antara pemerintah, swasta, dan nelayan dalam penanganan hasil perikanan pascapanen hingga proses ekspor.

Berbagai temuan penelitian mengenai kemitraan (*partnership*) dalam sektor perikanan menunjukkan bahwa isu kemitraan telah dikaji dari beragam konteks dan perspektif, seperti kemitraan layanan perikanan dalam kerangka governance di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Rasmun, 2024), kemitraan bahari dalam pemanfaatan sumber pesisir (Chikmawati, 2017), analisis kelembagaan kemitraan usaha perikanan tangkap berdasarkan regulasi dan implementasinya di tingkat daerah (Solihin & Nababan, 2017), hingga strategi pengembangan pola kemitraan antara pengusaha perikanan dan nelayan tradisional (Marjaya et al., 2008). Selain itu, sejumlah studi juga menyoroti kemitraan dalam konteks keberlanjutan perikanan dan penguatan kelembagaan lokal (Mustaruddin et al., 2024), penguatan jaringan kemitraan kelompok perempuan pengolah hasil perikanan (Setyaningrum & Maria, 2022), kemitraan berbasis pemberdayaan ekonomi desa dan kerja sama internasional (Fahrurrozi & Mardiana, 2024), serta kemitraan dalam pengembangan usaha perikanan tangkap skala kecil dan pola bagi hasil (Saleh & Tawari, 2017). Bahkan, kajian terbaru juga menyoroti kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hasil perikanan pesisir di wilayah perkotaan (Damayanti et al., 2025).

Namun demikian, beragam studi tersebut masih cenderung menempatkan kemitraan sebagai instrumen teknis, kelembagaan, atau strategi ekonomi semata, tanpa diikuti oleh eksplorasi teoritis dan empiris yang mendalam mengenai dinamika internal kemitraan itu sendiri, khususnya dalam konteks penanganan hasil perikanan pascapanen hingga proses ekspor. Aspek-aspek seperti kualitas relasi antar aktor, tingkat kepercayaan, komitmen kolektif, serta kapasitas bersama aktor pemerintah, swasta, dan nelayan dalam mengelola kemitraan belum banyak dikaji sebagai faktor penentu efektivitas kemitraan. Padahal, literatur tata kelola dan administrasi publik menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi lintas aktor sangat berkaitan dengan faktor internal organisasi dan psikologis kolektif, seperti kepercayaan, kepemimpinan kolaboratif, dan keyakinan bersama terhadap kemampuan kolektif untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara dominasi kajian kemitraan perikanan yang bersifat normatif, kelembagaan, dan teknis dengan minimnya penelitian yang menempatkan kemitraan sebagai proses sosial dan organisasional yang dinamis, khususnya dalam konteks penanganan hasil perikanan berbasis ekspor. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting bagi penelitian ini untuk menghadirkan perspektif alternatif dengan memfokuskan analisis pada dinamika kemitraan antara pemerintah, swasta, dan nelayan, guna memahami bagaimana faktor-faktor internal kemitraan berkontribusi terhadap efektivitas penanganan hasil perikanan pascapanen hingga proses ekspor.

Di sinilah konsep kemitraan (*partnership*) menjadi relevan dan menawarkan perspektif teoritis yang lebih komprehensif dalam menjawab permasalahan empiris yang dihadapi. Konsep kemitraan dalam administrasi publik pertama kali diperkenalkan secara sistematis oleh Kenneth Kernaghan (1993), yang memaknai kemitraan sebagai hubungan kolaboratif antara aktor pemerintah dan nonpemerintah yang didasarkan pada pembagian sumberdaya, tanggung jawab, serta risiko dalam mencapai tujuan bersama. Seiring perkembangannya, konsep kemitraan tidak lagi dipahami semata sebagai instrumen teknis kebijakan, tetapi berkembang menjadi kerangka tata kelola yang menekankan pentingnya relasi antarpemangku kepentingan. Dalam perspektif administrasi publik kontemporer, kemitraan mencerminkan pergeseran paradigma tata kelola dari pendekatan hierarkis menuju tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang menuntut pemerintah bersikap lebih adaptif, partisipatif, serta mampu membangun relasi strategis dengan aktor non negara, termasuk sektor swasta dan nelayan, dalam mendukung pengembangan perikanan berbasis ekspor secara berkelanjutan.

Penelitian lain, Ramla Dula Saleh dan Ruslan Tawari (2017) dengan judul Strategi Pengembangan Usaha Penangkapan Tuna Skala Kecil Di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Penentuan strategi kemitraan dan pola bagi hasil optimal, penelitian dilakukan untuk merumuskan strategi pengembangan usaha penangkapan ikan tuna skala kecil di Kabupaten Seram Bagian Barat. Secara lebih khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi kemitraan antara nelayan dengan pemilik modal serta pola bagi hasil yang optimal bagi kedua belah pihak. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis keuntungan, optimasi BEP dan UMP, serta simulasi untuk hasil yang optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi kemitraan yang ideal adalah mengedepankan aspek proporsionalitas, keadilan, rezeki dan keberlanjutan dengan formulasi bagi hasil yang optimal yaitu 48 : 52, masing-masing untuk nelayan dan pemilik modal.

Sekar Damayanti dan Lilik Ekowati (2025) dengan judul Kemitraan Pemerintah Dan Masyarakat Mengelola Hasil Perikanan Pesisir Kenjeran: Studi Pada Pengelolaan Hasil Perikanan Di Kecamatan Bulak, Kelurahan Kedung Cowek, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa adanya suatu kerjasama antara Pemerintah dan UMKM dalam suatu pengembangan usaha pengolahan hasil perikanan (Studi Pada Pengolahan Hasil Perikanan di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya). Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori kemitraan yang divisualisasikan melalui 3 aspek dan 6 indikator. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan pemerintah bersama UMKM Pesisir Kenjeran dalam mengelola hasil perikanan pesisir kenjeran sudah berjalan baik, tetapi belum optimal, hal tersebut dilihat dari beberapa indikator kemitraan yang sudah dijalankan namun belum bisa maksimal.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan Model Kemitraan dalam menelaah penanganan hasil perikanan berbasis ekspor. Penelitian ini tidak hanya memandang kemitraan sebagai instrumen teknis, kelembagaan, atau strategi ekonomi, tetapi sebagai sistem tata kelola kolaboratif yang dibentuk oleh struktur kemitraan, kepemimpinan relasional, dan komitmen organisasi. Melalui model ini, penelitian menjelaskan bagaimana hubungan antar aktor, distribusi sumberdaya, jaringan kerja, kepemimpinan yang membangun kepercayaan, serta komitmen kelembagaan berperan dalam meningkatkan efektivitas penanganan hasil perikanan pascapanen dan daya serap ekspor di Kabupaten Bone.

Berangkat dari identifikasi celah pengetahuan dan permasalahan empiris di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan teoritis dan empiris dengan mengeksplorasi secara mendalam dinamika kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan nelayan dalam penanganan hasil perikanan berbasis ekspor di Kabupaten Bone. Penelitian ini berupaya menghadirkan perspektif administrasi publik dan tata kelola kolaboratif untuk memahami bagaimana kemitraan dibangun, dijalankan, dan berkontribusi terhadap daya serap hasil perikanan ke dalam rantai ekspor.

Secara spesifik, penelitian ini memiliki tiga pokok bahasan utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana struktur dan pola hubungan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan nelayan terbentuk dan dimaknai oleh para aktor yang terlibat dalam pengelolaan hasil perikanan berbasis ekspor. Melalui pendekatan kualitatif yang mendalam, penelitian ini akan mengeksplorasi proses sosial, interaksi antar aktor, pengalaman kelembagaan, serta faktor-faktor kontekstual yang berkontribusi terhadap keseimbangan peran, posisi tawar, dan kualitas relasi dalam kemitraan tersebut.

Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dinamika internal kemitraan termasuk tingkat kepercayaan, komitmen kolektif, pola koordinasi, dan kapasitas layanan pemerintah berkontribusi terhadap efektivitas penanganan hasil perikanan pascapanen hingga proses ekspor. Fokus ini diarahkan untuk memahami sejauh mana kemitraan yang ada mampu mendukung peningkatan mutu produk, keberlanjutan pengelolaan, serta akses nelayan terhadap pasar ekspor.

Ketiga, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kemitraan sebagai mekanisme tata kelola kolaboratif dalam kebijakan perikanan daerah, khususnya dalam menjembatani fragmentasi koordinasi antar aktor dan memperkuat peran pemerintah daerah sebagai fasilitator. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan model kemitraan perikanan berbasis ekspor yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.

1.2 Justifikasi Teori

Berdasarkan permasalahan empiris yang ditemukan, penelitian ini mengusulkan model kemitraan sebagai pendekatan penting untuk memastikan keterpaduan tata kelola kemitraan, kualitas relasi antar aktor, serta komitmen kelembagaan dalam menjalankan kerja sama. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan solusi yang lebih komprehensif, berkelanjutan, sekaligus mencerminkan pembaruan paradigma tata kelola pemerintahan yang menuntut pemangku kepentingan lebih terbuka, adaptif, dan mampu membangun kemitraan strategis. Penelitian ini dibangun berdasarkan integrasi tiga pilar teori utama. Pertama, teori *Partnership* sebagaimana dirumuskan oleh Uhlik (2007) dipilih karena memberikan kerangka konseptual untuk memahami kemitraan sebagai hubungan kolaboratif antara pemerintah dan aktor nonpemerintah yang didasarkan pada pembagian sumberdaya, tanggung jawab, serta risiko dalam mencapai tujuan bersama. Pendekatan ini relevan untuk menjelaskan bagaimana struktur hubungan antara pemerintah daerah, perusahaan mitra, dan nelayan dibentuk dalam pengelolaan hasil perikanan berbasis ekspor. Namun, teori *partnership* dalam bentuk konvensional cenderung menekankan aspek struktural dan normatif, sehingga belum sepenuhnya mampu menjelaskan dinamika kualitas relasi, kepemimpinan, dan ketimpangan kekuasaan dalam praktik kemitraan.

Kedua, untuk menjawab keterbatasan tersebut, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan *Relational Leadership* dari Fischer dan Singh (2012). Teori ini memandang kepemimpinan sebagai proses relasional yang dibangun melalui interaksi sosial, keselarasan visi, komunikasi dialogis, dan pembagian kekuasaan antar aktor. *Relational leadership* menjadi relevan dalam konteks kemitraan perikanan berbasis ekspor karena efektivitas kerja sama tidak hanya ditentukan oleh desain struktural, tetapi juga oleh kemampuan aktor khususnya pemerintah daerah dalam memfasilitasi dialog, membangun kepercayaan, dan mengelola ketimpangan relasi antara nelayan dan perusahaan. Dengan demikian, teori ini memberikan dimensi prosedural dalam memahami bagaimana kemitraan dijalankan dan dipertahankan.

Ketiga, penelitian ini juga menggunakan konsep *Organizational Commitment* yang dikembangkan oleh Weibo et al. (2010) untuk menjelaskan dimensi internal kelembagaan yang berkontribusi terhadap keberlanjutan kemitraan. Komitmen organisasi yang terdiri atas komitmen afektif, keberlanjutan, dan normatif menjadi faktor penting dalam memastikan konsistensi implementasi kebijakan serta stabilitas hubungan antar aktor. Dalam konteks administrasi publik, rendahnya komitmen organisasi sering kali menyebabkan ketidakberlanjutan program, lemahnya kepatuhan terhadap kesepakatan, serta fragmentasi koordinasi. Oleh karena itu, teori ini dipilih untuk menjelaskan mengapa kemitraan dalam sektor perikanan belum mampu menghasilkan kinerja optimal dalam meningkatkan daya serap ekspor.

Integrasi ketiga teori tersebut dilakukan dalam perspektif *collaborative governance*, yang menekankan pentingnya dialog, pembangunan kepercayaan, kepemimpinan fasilitatif, dan komitmen bersama dalam kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, justifikasi teoritis penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menggeser analisis kemitraan dari pendekatan struktural dan teknis menuju pendekatan yang lebih integratif, relasional, dan berbasis komitmen kelembagaan. Pendekatan ini diyakini lebih mampu menjelaskan dinamika kemitraan perikanan berbasis ekspor secara komprehensif dan kontekstual.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai kemitraan dalam pengelolaan hasil perikanan berbasis ekspor di Kabupaten Bone menjadi sangat urgen baik secara empiris, teoritis, maupun kebijakan. Secara empiris, data menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kapasitas produksi hasil perikanan nelayan dan kemampuan serapan industri dalam skema kemitraan ekspor. Selama lima tahun terakhir, rata-rata serapan hasil perikanan dalam skema kemitraan berbasis ekspor hanya berada pada kisaran yang sangat rendah dibandingkan total produksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi yang seharusnya dapat dioptimalkan melalui hilirisasi dan akses pasar internasional belum dimanfaatkan secara maksimal. Rendahnya daya serap tersebut tidak hanya berdampak pada terbatasnya nilai tambah yang diperoleh nelayan, tetapi juga berimplikasi pada lemahnya kontribusi sektor perikanan terhadap penguatan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Selain itu, ketimpangan distribusi hasil perikanan yang sebagian besar masih terserap di pasar lokal mencerminkan belum efektifnya sistem tata kelola kemitraan yang berjalan. Permasalahan ini diperkuat oleh lemahnya koordinasi antar aktor, ketidakseimbangan posisi tawar antara nelayan dan pelaku usaha, keterbatasan infrastruktur pasca panen dan rantai dingin, serta belum optimalnya peran pemerintah daerah sebagai fasilitator kolaborasi. Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka potensi sumber perikanan yang melimpah di Kabupaten Bone berisiko mengalami stagnasi nilai tambah dan kehilangan peluang daya saing di pasar global.

Secara teoritis, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memperkaya khazanah kajian Administrasi Publik, khususnya dalam konteks tata kelola kemitraan sektor perikanan berbasis ekspor. Selama ini, penelitian mengenai perikanan ekspor lebih banyak berfokus pada aspek teknis produksi, standar mutu, dan efisiensi rantai pasok, sementara dinamika internal kemitraan sebagai proses sosial dan organisasional belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, keberhasilan kemitraan tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya dan struktur kelembagaan, tetapi juga oleh kualitas relasi antar aktor, kepemimpinan kolaboratif, serta komitmen organisasi dalam menjaga keberlanjutan kerja sama. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara pendekatan struktural kemitraan dan dinamika relasional yang berkontribusi terhadap efektivitas implementasi kebijakan.

Dari sisi kebijakan, penelitian ini memiliki urgensi strategis dalam mendukung perumusan model kemitraan perikanan berbasis ekspor yang lebih adil, adaptif, dan berkelanjutan. Pemerintah daerah memerlukan kerangka analitis yang komprehensif untuk memperkuat perannya sebagai fasilitator kolaborasi antara nelayan dan sektor swasta. Tanpa adanya model kemitraan yang berbasis pada prinsip tata kelola kolaboratif, peningkatan produksi tidak akan secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan nelayan maupun daya saing ekspor daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi konseptual dan praktis bagi penguatan kebijakan daerah, optimalisasi hilirisasi perikanan, serta peningkatan daya serap hasil perikanan ke dalam rantai ekspor secara berkelanjutan. Dengan demikian, urgensi penelitian ini tidak hanya terletak pada kebutuhan akademik untuk mengembangkan model teoritis kemitraan yang lebih integratif, tetapi juga pada kebutuhan praktis untuk menjawab permasalahan nyata rendahnya efektivitas kemitraan dalam pengelolaan hasil perikanan berbasis ekspor di Kabupaten Bone. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan strategis dalam mendorong transformasi tata kelola perikanan daerah menuju sistem kemitraan yang lebih kolaboratif, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah ekspor.

1.4 Kerangka Teoritis (*Theoretical Framework*)

Kerangka teoritis penelitian ini dibangun melalui integrasi konseptual antara *Partnership Theory*, *Relational Leadership*, dan *Organizational Commitment* dalam perspektif tata kelola kolaboratif. Integrasi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana struktur kemitraan, kualitas kepemimpinan relasional, dan tingkat komitmen organisasi berinteraksi dalam berperan dalam membentuk efektivitas penanganan hasil perikanan pasca panen serta peningkatan daya serap ekspor di Kabupaten Bone.

Pada level struktural, teori *partnership* (Uhlik, 2007) digunakan untuk memetakan elemen dasar kemitraan yang meliputi hubungan (*relationships*), sumberdaya (*resources*), jaringan (*networks*), dan organisasi (*organizations*). Elemen-elemen tersebut menjelaskan bagaimana kemitraan antara pemerintah daerah, perusahaan mitra, dan nelayan dibentuk, bagaimana pembagian peran dilakukan, serta bagaimana daya dikelola dalam mendukung proses hilirisasi dan ekspor. Struktur kemitraan yang jelas dan seimbang menjadi prasyarat awal bagi terciptanya efektivitas kolaborasi.

Pada level prosesual, pendekatan *relational leadership* (Fischer & Singh, 2012) menjelaskan bagaimana kualitas interaksi dan kepemimpinan berperan dalam dinamika kemitraan. Keselarasan visi, komunikasi relasional, akuntabilitas timbal balik, dan pembagian kekuasaan menjadi faktor yang berperan dalam membentuk tingkat kepercayaan dan koordinasi antar aktor. Kepemimpinan relasional berperan sebagai mekanisme yang menjembatani ketimpangan kapasitas dan kepentingan, serta mendorong komitmen kolektif dalam mencapai tujuan peningkatan daya saing ekspor.

Pada level internal kelembagaan, *organizational commitment* (Weibo et al., 2010) menjelaskan keberlanjutan partisipasi aktor dalam kemitraan. Komitmen afektif, keberlanjutan, dan normatif berperan dalam konsistensi implementasi kebijakan serta stabilitas hubungan kerja sama. Tingginya komitmen organisasi akan memperkuat efektivitas kemitraan, sedangkan rendahnya komitmen berpotensi menyebabkan fragmentasi koordinasi dan lemahnya implementasi program.

Secara integratif, kerangka teoritis penelitian ini menjelaskan bahwa efektivitas kemitraan perikanan berbasis ekspor ditentukan oleh keterpaduan antara struktur kemitraan yang seimbang, kepemimpinan relasional yang inklusif, dan komitmen organisasi yang kuat. Struktur kemitraan menyediakan fondasi formal kerja sama, kepemimpinan relasional menggerakkan proses kolaborasi, dan komitmen organisasi menjamin keberlanjutan partisipasi. Ketiga komponen tersebut secara bersama-sama mendorong peningkatan kualitas penanganan pascapanen, kapasitas serap industri, serta peningkatan daya saing ekspor hasil perikanan.

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan kemitraan sebagai sistem relasional adaptif dalam tata kelola perikanan daerah. Kerangka teoritis ini tidak hanya menjelaskan bagaimana kemitraan dibentuk secara struktural, tetapi juga bagaimana dinamika internal relasi dan komitmen kelembagaan berperan dalam membentuk keberhasilan peningkatan daya serap hasil perikanan ke dalam rantai ekspor. Perspektif integratif ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian Administrasi Publik sekaligus menawarkan model kemitraan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan dalam pengelolaan perikanan berbasis ekspor.

1.5 Model Penelitian (*Rangkaian Studi*)

Konsep *Partnership* dari Kim Uhlik (2007), yang menekankan empat elemen utama, *relationships*, *resources*, *networks*, dan *organizations* menjadi titik awal konseptual dalam memahami struktur dan mekanisme kemitraan perikanan berbasis ekspor di Kabupaten Bone. Kerangka ini memungkinkan pemetaan sistemik mengenai aktor-aktor yang terlibat, distribusi sumberdaya, serta konfigurasi jaringan kolaboratif antara pemerintah daerah, perusahaan mitra,

dan nelayan. Dalam konteks empiris rendahnya daya serap hasil produksi nelayan meskipun kapasitas produksi relatif tinggi, pendekatan ini membantu mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan relasi, fragmentasi jaringan, dan kelemahan koordinasi struktural dalam tata kelola kemitraan.

Namun demikian, pendekatan *partnership* tersebut masih memiliki keterbatasan konseptual. Model ini cenderung memposisikan kemitraan sebagai konfigurasi struktural antar aktor tetapi belum secara memadai menjelaskan dinamika relasional yang berperan dalam membentuk kualitas interaksi, distribusi kekuasaan, serta pembentukan kepercayaan di antara aktor dengan kapasitas dan kepentingan yang berbeda. Dalam praktik kemitraan sektor perikanan, persoalan sering kali tidak terletak pada absennya aktor, melainkan pada lemahnya kualitas relasi dan kepemimpinan yang menggerakkan kolaborasi tersebut. Keterbatasan inilah yang menuntut perluasan kerangka analitis melampaui pendekatan struktural semata.

Kesenjangan tersebut diisi oleh konsep *Relational Leadership* yang dikemukakan oleh Fischer dan Singh (2012), yang memandang kepemimpinan sebagai proses sosial yang dibangun melalui keselarasan visi bersama, komunikasi dialogis, pembagian kekuasaan (*power sharing*), dan akuntabilitas timbal balik. Pendekatan ini memberikan penjelasan mengenai bagaimana kualitas interaksi dan distribusi keterkaitan antar aktor membentuk efektivitas kemitraan. Dalam konteks Kabupaten Bone, *relational leadership* menjadi krusial untuk menjelaskan bagaimana pemerintah daerah, perusahaan mitra, dan nelayan membangun kepercayaan, mengurangi asimetri kekuasaan, serta menyepakati mekanisme kerja sama yang lebih adil dan berorientasi pada kinerja ekspor. Tanpa dimensi kepemimpinan relasional, kemitraan cenderung bersifat formalistik dan transaksional, sehingga tidak mampu mendorong transformasi kinerja secara berkelanjutan.

Meski demikian, kepemimpinan relasional saja belum cukup menjamin keberlanjutan kemitraan. Banyak kemitraan gagal bukan karena absennya struktur atau kepemimpinan, melainkan karena lemahnya komitmen kelembagaan dalam mempertahankan konsistensi kebijakan dan implementasi. Oleh karena itu, konsep *Organizational Commitment* dari Weibo et al. (2010) menjadi relevan untuk melengkapi analisis. Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan kolaborasi sangat ditentukan oleh komitmen afektif, normatif, dan keberlanjutan (*continuance commitment*) organisasi yang terlibat. Dalam perspektif Administrasi Publik, rendahnya komitmen organisasi berimplikasi pada inkonsistensi implementasi kebijakan, lemahnya kepatuhan terhadap kesepakatan kemitraan, serta rapuhnya keberlanjutan program penguatan ekspor. Dengan demikian, komitmen organisasi menjadi determinan penting dalam menjelaskan mengapa kemitraan belum mampu meningkatkan daya serap hasil perikanan secara optimal.

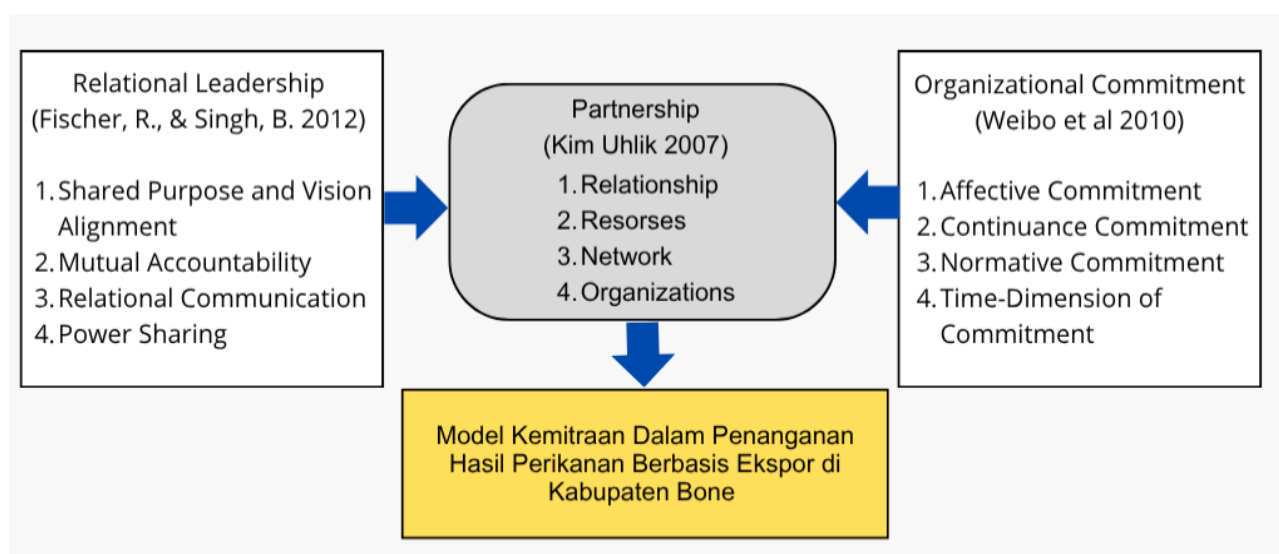
Dengan mengintegrasikan *Partnership* (Uhlik), *Relational Leadership* (Fischer & Singh), dan *Organizational Commitment* (Weibo et al.), penelitian ini membangun model kemitraan perikanan berbasis ekspor yang bersifat struktural, relasional komitmen dalam perspektif tata kelola kolaboratif. Integrasi ini bukan sekadar penggabungan teori, melainkan upaya konseptual untuk menjawab fragmentasi literatur kemitraan yang selama ini memisahkan dimensi struktur, dinamika kepemimpinan, dan komitmen kelembagaan.

Pada tingkat doktoral, penelitian ini memiliki urgensi epistemologis yang kuat karena menawarkan sintesis teoritis atas tiga pendekatan yang selama ini berkembang secara parsial dan terpisah dalam literatur Administrasi Publik. Studi-studi kemitraan umumnya berfokus pada desain institusional atau konfigurasi jaringan, sementara studi kepemimpinan dan komitmen organisasi berkembang dalam tradisi teoritis yang berbeda tanpa integrasi yang sistematis dalam konteks tata kelola kolaboratif sektor ekonomi lokal. Akibatnya, literatur belum mampu menjelaskan secara komprehensif paradoks empiris yang terjadi di Kabupaten Bone yaitu tingginya kapasitas produksi namun rendahnya daya serap ekspor.

Penelitian ini menjadi penting pada level doktoral karena berupaya menjembatani fragmentasi tersebut melalui konstruksi Model Kemitraan, yaitu model yang menjelaskan kemitraan sebagai sistem adaptif yang diikat secara simultan oleh struktur jaringan, kualitas kepemimpinan relasional, dan kekuatan komitmen organisasi.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian Administrasi Publik pada tiga aspek utama. Pertama, memperkaya diskursus *collaborative governance* dengan menempatkan kemitraan perikanan sebagai arena tata kelola strategis yang tidak hanya keterkaitan oleh desain formal, tetapi juga oleh dinamika relasional dan komitmen kelembagaan. Kedua, mengembangkan model kemitraan berbasis ekspor daerah yang kontekstual, sehingga memberikan perspektif baru dalam studi tata kelola pembangunan ekonomi lokal. Ketiga, menawarkan kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar analisis kebijakan dan perumusan intervensi tata kelola yang lebih adaptif dan berkelanjutan. Secara empiris, penelitian ini memberikan kontribusi dalam menjelaskan secara lebih komprehensif hubungan antara struktur kemitraan, kualitas kepemimpinan, dan komitmen organisasi terhadap peningkatan daya serap ekspor. Dengan demikian, model yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dalam mendukung penguatan tata kelola kemitraan perikanan berbasis ekspor.

Keunggulan penelitian ini terletak pada kemampuannya merumuskan model kemitraan yang integratif dan kontekstual. Model ini melampaui pendekatan kemitraan yang selama ini cenderung parsial dan sektoral, karena menempatkan kemitraan sebagai sistem kolaboratif adaptif yang menggabungkan dimensi struktural, relasional, dan komitmen kelembagaan secara simultan. Dengan demikian, model ini memberikan landasan konseptual yang lebih komprehensif bagi pengembangan kebijakan kemitraan yang berorientasi pada kinerja ekspor dan keberlanjutan ekonomi lokal.



Gambar 1.1 Model Penelitian Kemitraan (Partnership)

1.6 Topik Penelitian

1. Analisis Kemitraan dalam Penanganan Hasil Perikanan Berbasis Ekspor di Kabupaten Bone
2. Relational Leadership dalam Penanganan Hasil Perikanan Berbasis Ekspor di Kabupaten Bone
3. Komitmen Organisasi dalam Penanganan Hasil Perikanan Berbasis Ekspor di Kabupaten Bone

Ketiga topik penelitian tersebut selanjutnya disintesis untuk menjawab rumusan masalah keempat, yaitu merumuskan Model Kemitraan dalam penanganan hasil perikanan berbasis ekspor di Kabupaten Bone. Model tersebut diharapkan tidak hanya menjembatani kesenjangan antara potensi produksi dan daya serap ekspor, tetapi juga memperkuat tata kelola kemitraan yang berorientasi pada keberlanjutan dan peningkatan kesejahteraan nelayan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, permasalahan utama penelitian ini terletak pada rendahnya efektivitas kemitraan dalam penanganan hasil perikanan berbasis ekspor di Kabupaten Bone. Meskipun potensi produksi perikanan relatif besar, daya serap hasil perikanan ke dalam skema kemitraan ekspor masih sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pasca panen, infrastruktur, atau standar mutu, tetapi juga menyangkut tata kelola kemitraan antar aktor. Dalam praktiknya, kemitraan antara pemerintah, perusahaan eksportir, dan nelayan masih menghadapi kendala berupa ketimpangan posisi tawar, lemahnya koordinasi, terbatasnya akses informasi pasar, serta belum kuatnya komitmen kelembagaan. Sementara itu, penelitian terdahulu masih cenderung membahas kemitraan perikanan secara parsial, baik dari aspek teknis, kelembagaan, produksi, maupun rantai pasok.

Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peran kemitraan, kepemimpinan relasional, dan komitmen organisasi dalam penanganan hasil perikanan berbasis ekspor, serta merumuskan Model Kemitraan yang tepat bagi penguatan tata kelola kemitraan perikanan ekspor di Kabupaten Bone. Berdasarkan permasalahan penelitian tersebut, pertanyaan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kemitraan (*partnership*) dalam penanganan hasil perikanan berbasis ekspor di Kabupaten Bone?
2. Bagaimana peran kepemimpinan relasional dalam mendukung efektivitas kemitraan (*partnership*) penanganan hasil perikanan berbasis ekspor di Kabupaten Bone?
3. Bagaimana peran komitmen organisasi dalam mendukung efektivitas kemitraan (*partnership*) penanganan hasil perikanan berbasis ekspor di Kabupaten Bone?
4. Bagaimana model kemitraan (*partnership*) yang tepat dalam penanganan hasil perikanan berbasis ekspor di Kabupaten Bone?

1.7 Rancangan Metodologi Secara Umum

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam dinamika kemitraan dalam penanganan hasil perikanan berbasis ekspor di Kabupaten Bone. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengungkapan makna, proses, dan interaksi sosial yang terjadi antara aktor-aktor yang terlibat dalam kemitraan, khususnya terkait peran relational leadership, komitmen organisasi, serta mekanisme kemitraan dalam meningkatkan daya serap hasil perikanan ekspor.

Informan penelitian ditentukan secara purposif (*purposive sampling*) berdasarkan kriteria pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pengelolaan dan kemitraan hasil perikanan berbasis ekspor. Informan meliputi unsur pemerintah daerah (Dinas Kelautan dan Perikanan, dinas terkait), perusahaan mitra/eksportir, nelayan dan kelompok nelayan, serta aktor pendukung lainnya seperti koperasi, pelaku logistik rantai dingin, dan lembaga pendamping.

Pemilihan informan ini dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai struktur kemitraan, relasi antar aktor, serta komitmen kelembagaan yang berkontribusi terhadap efektivitas penanganan hasil perikanan.

Tabel 1.3 Data informan penelitian

No.	Nama Informan	Instansi / Pekerjaan
1	Ahmad	CV Lintas Samudra Mandiri (Perusahaan Eksportir)
2	Nurdin Kasim	CV Lintas Samudra Mandiri (Perusahaan Eksportir)
3	Irfan Amir	Aruna Miniplant PT Aruna Jaya Nusantara (Perusahaan Eksportir)
4	Taufik	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan
5	Junaidi	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Bosowasi
6	Arfan	UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I Kabupaten Bone
7	Nurul Fidyah	UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I Kabupaten Bone
8	Heriafian	LSM Latenritatta
9	Andi Aminah	Pengusaha Perikanan Ekspor
10	Yusdi	Nelayan Kabupaten Bone
11	Andi Irham	Nelayan Kabupaten Bone
12	H. Asnawi	Nelayan Kabupaten Bone
13	Hendra	Nelayan Kabupaten Bone
14	Lukman	Nelayan Kabupaten Bone
15	Sandi	Nelayan Kabupaten Bone
16	Amran	Nelayan Kabupaten Bone
17	Muh Hamzah	Pengurus Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Sumber: Diolah Peneliti 2025

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik utama, yaitu wawancara mendalam (*in depth interviews*) untuk menggali pandangan, pengalaman, dan persepsi informan terkait praktik kemitraan, kepemimpinan relasional, serta komitmen organisasi; observasi partisipatif (*participant observation*) untuk mengamati secara langsung proses penanganan pascapanen, interaksi antar aktor, dan dinamika kemitraan di lapangan; diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*) untuk memperoleh pemahaman kolektif dan mengidentifikasi kesamaan maupun perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan; serta studi dokumentasi terhadap kebijakan, perjanjian kemitraan, laporan produksi dan ekspor, serta dokumen resmi lainnya yang relevan. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman (2014) yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data (*data condensation*) melalui proses seleksi, pengkodean, dan pengelompokan data sesuai fokus penelitian; penyajian data (*data display*) dalam bentuk matriks, tabel, dan narasi analitis untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar konsep; serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*) secara berulang dan berkesinambungan. Untuk menjaga validitas dan kredibilitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan metode, member *checking* kepada informan kunci, serta audit trail guna memastikan transparansi proses penelitian dan meningkatkan keabsahan hasil. Dengan pendekatan metodologis ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang mendalam, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sekaligus memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kajian Administrasi Publik, khususnya dalam tata kelola kemitraan di sektor perikanan berbasis ekspor.